

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. KPPU dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengawasi, dan menegakkan hukum persaingan usaha. Kewenangan yang dimiliki oleh KPPU mengalami keterbatasan di era ekonomi digital, menyangkut pelaku usaha yang mendominasi pasar sudah tidak terikat batas wilayah lagi. Digitalisasi ekonomi menjadikan hukum persaingan usaha semakin kompleks yang bersifat *multi-sided markets* dan menghambat KPPU dalam menangani perkara terhadap pelaku usaha yang berada di luar negeri. KPPU dalam menangani pelaku usaha yang berasal dari luar negeri mengalami kesulitan menyangkut belum diterapkannya prinsip ekstrateritorial yang nampak pada definisi pelaku usaha masih terbatas bagi pelaku usaha dalam negeri. Implikasinya KPPU tidak dapat mengumpulkan bukti secara langsung dan mengandalkan *indirect evidence* dan tidak dapat memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi untuk dimintai keterangan.
2. Peneliti menganalisis konfigurasi politik hukum persaingan usaha di Indonesia terjadi dalam konfigurasi politik demokratis yang melahirkan produk hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkarakter responsif. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha terhadap pelaku usaha dari luar negeri

dapat diatasi dengan penerapan prinsip ekstrateritorial. Rumusan *ius constituendum* yang memberikan penguatan kewenangan ekstrateritorial KPPU meliputi perluasan definisi pelaku usaha dari dalam negeri dan luar negeri yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia; tata cara penanganan perkara persaingan usaha di era ekonomi digital yang menerapkan pengumpulan alat bukti tertulis yang lebih menguatkan kewenangan KPPU dibandingkan penggunaan alat bukti surat dan/atau dokumen yang dianggap membatasi KPPU dalam mengumpulkan bukti digital yang tidak selalu berupa surat dan/atau dokumen; akomodasi paradigma ekonomi industri baru; penggunaan doktrin efek; penambahan kewenangan penggeledahan dan memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi untuk dimintai keterangan.

## **B. Saran**

Peneliti mengharapkan adanya penelitian selanjutnya dengan menggunakan jenis penelitian dan pendekatan yang berbeda, yakni jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji efektivitas pelaksanaan kewenangan KPPU di era ekonomi digital setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disahkan memberikan penguatan kewenangan ekstrateritorial dalam penanganan perkara terhadap pelaku usaha ekonomi digital yang berasal dari luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, A., & Heryani, W. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Corradi, M., & Nowag, J. 2023. *Intersections Between Corporate and Antitrust Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cormen, T. H. 2022. *Introduction to Algorithms* (Fourth Edition). Massachusetts: The MIT Press.
- Deliarnoor, D. N. 2017. *Teori dan Praktek Kewenangan*. Bandung: Pandiva.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. 2017. *American Law: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Gunawan, J. 2021. *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Hartono, S. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hasbi, A. L. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hansen, K., Dkk. 2002. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Katalis Publishing.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Publisher.
- Kuntjoro-Jakti, D. 2021. *Meninjau Ulang Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna Mendorong Pembangunan Nasional*. Chapter Book: *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang belum terselesaikan*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Latif, A., & Hasbi, A. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, A. F., Dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Buku Text Edisi Kedua)*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Margono, S. 2019. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'oed, M., & MacAndrews, C. 2016. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.

- McKinsey. 2016. *Unlocking Indonesia's Digital Opportunity*. Jakarta: McKinsey Indonesia Office.
- Mahfud MD, M. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud MD, M. 2012. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali.
- Mahfud MD, M. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moloeng, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. A. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Peng, S., Dkk. 2021. *Artificial Intelligence and International Law: Disruption, Regulation, and Reconfiguration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prasetyo, T., & Purnomosidi, A. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. 2017. *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang: Setara Press.
- Rahardjo, S. 1982. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Alumni.
- Ruiter, D. W. P. 2001. *Legal Institutions*. Enschede: Kluwer Academic Publishers
- Ruky, I. M. 2021. "Demokrasi Ekonomi dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha". In *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang belum terselesaikan*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Shidarta. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sirait, N. N. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: KPPU & Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Situmeang, S. M. T. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sourdin, T. 2021. *Judges, Technology and Artificial Intelligence: The Artificial Judge*. Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Tapscott, D. 1996. *The Digital Economy—Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. United States: McGraw-Hill.
- Usman, R. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widijantoro, J., Widiyastuti, Y. S. M., & Harsiwi, Th. A. M. 2020. *Pemetaan Masalah Konsumen dalam Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Widiyastuti, Y. S. M. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wignjosoebroto, S. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM.

#### **Jurnal:**

- Adhikara, C. T. 2005. Siapa Konsumen Kita? : Analisis Perubahan Konsumen di Era Ekonomi Baru. *Journal The Winners*, Vol. 6, No. 2. <https://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/606/584>.
- Agarwal, V., & Dudat, A. 2023. Indonesia's Digital Economy's Development . *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, Vol. 4, No. 2. <https://doi.org/10.34306/itsdi.v4i2.580>.
- Andriychuk, O. 2022. Shifting the Digital Paradigm: Towards a Sui Generis Competition Policy. *Computer Law & Security Review*, Vol. 46. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105733>.
- Anisah, S. 2020. The Use of *Per Se Illegal* Approach in Proving the Price-Fixing Agreement in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, No. 1. <https://doi.org/10.18196/jmh.20200145>.
- Anita. 2022. Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FH UI*, Vol. 2, No. 1.
- Arena, R., & Dutraive, V. 2016. Industrial Economics and Policy: Recent History and Theoretical Foundations. *Revue d'Economie Industrielle* 154. <https://journals.openedition.org/rei/6325>.
- Ayunda, R. 2022. Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: What Are the Legal Challenges and Certainties? *Law Reform*, Vol. 18, No. 2. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.43307>.

- Bar-Gill, O. 2018. Algorithmic Price Discrimination: When Demand Is a Function of Both Preferences and (Mis)Perceptions. *Forthcoming, University of Chicago Law Review*, Vol. 86. <https://ssrn.com/abstract=3184533>.
- Calvano, E., & Polo, M. 2021. Market Power, Competition and Innovation in Digital Markets: A Survey. *Information Economics and Policy*, Vol. 54. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100853>.
- Chandra, L. R. 2022. Analysis of Increasing Online Business in Indonesia during the COVID-19 Pandemic. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021): Series Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.317>.
- Darmawan, I. A., Isis, I., & Faisal, P. 2018. Cross-Border Business Competition: Keabsahan dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. 2019. The Enforcement of Business Competition Law by the Police: An Indonesian Experience. *Lentera Hukum*, Vol. 6, Issue. 2. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i2.12013>.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. 2020. Makna dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4.
- Estey, W. 1997. The Five Bases of Extraterritorial Jurisdiction and the Failure of the Presumption and against Extraterritoriality. *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 21, No. 1. [https://repository.uclawsf.edu/hastings\\_international\\_comparative\\_law\\_review/vol21/iss1/3](https://repository.uclawsf.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol21/iss1/3).
- Hartoko, W. E. 2002. Good Corporate Governance in Indonesia. *Griffin's View on International and Comparative Law*, Vol. 3 No. 1.
- Ezrachi, A., & Stucke, M. E. 2017. Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition. *University of Illinois Law Review*, Vol. 2017. <https://ssrn.com/abstract=2591874>.
- Fadhilah, M. 2019. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>.
- Fast, V., Dkk. 2023. Regulation of Data-Driven Market Power in the Digital Economy: Business Value Creation and Competitive Advantages from Big



- Data. *Journal of Information Technology*, Vol. 38, Issue. 2. <https://doi.org/10.1177/02683962221114394>.
- Fidhayanti, D., & Arifah, R. N. 2021. Penerapan Prinsip Rule Of Reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix. *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1, No. 1.
- Gautier, A., Dkk.2020.AI Algorithms, Price Discrimination and Collusion: A Technological, Economic and Legal Perspective. *European Journal of Law and Economics* 50. <https://doi.org/10.1007/s10657-020-09662-6>.
- Ghafur, J. 2023. Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1.
- Hanley, D. A. 2020. A Topology of Multisided Digital Platforms. *Connecticut Publik Interest Law Journal*, Vol. 19, No. 2. <https://ssrn.com/abstract=3651606>.
- Hayati, A. N. 2021. Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>.
- Herfian, R. A., & Sabirin, A. 2021. Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.23>.
- Jin, G. Z., & Wagman, L. 2021. Big Data at the Crossroads of Antitrust and Consumer Protection. *Information Economics and Policy*, Vol. 54, No. 100865. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100865>.
- Katz, M., & Sallet, J. 2018. Multisided Platforms and Antitrust Enforcement. *The Yale Law Journal*, Vol. 127, No. 7.
- Khan, L. M., & Vaheesan, S. 2017. Market Power and Inequality: The Antitrust Counterrevolution and Its Discontents. *Harvard Law & Policy Review* 35. [https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2790/](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2790/).
- Koos, S. 2021. Artificial Intelligence as Disruption Factor in the Civil Law: Impact of the use of Artificial Intelligence in Liability, Contracting, Competition Law and Consumer Protection with Particular Reference to the German and Indonesian Legal Situation. *Yuridika*, Vol. 36, No. 1. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.24033>.
- Koos, S. 2022. Digital Globalization and Law. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.

- Lathifah, H.2014. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1476>.
- Lee, C. 2022. Competition Policy in the age of Algorithms: Challenges for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 58, No. 3. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2125488>.
- Leslie, C. R. 2023. Predatory Pricing Algorithms. *New York University Law Review*, Vol. 98, No. 1. <https://www.nyulawreview.org/issues/volume-98-number-1/predatory-pricing-algorithms/>.
- Lianos, I. 2019. Competition Law for A Complex Economy. *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50. <https://doi.org/10.1007/s40319-019-00829-6>.
- Mantili, R., Dkk. 2016. Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- McKay, A., & Weinstein, S. 2022. Dynamic Pricing Algorithms, Consumer Harm, and Regulatory Response. *Washington University Law Review* 111. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3979147>.
- Menthe, D. C. 1998. Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, Vol. 4, Issue. 4.
- Michael, B. 2022. Competition Law in the Asia-Pacific Region makes Small and Medium Enterprises Poorer without Innovation Law. *Journal of the Asia Pacific Economy*, Vol. 26, Issue. 3.
- Mitchell, A. D. 2001. Broadening the Vision of Trade Liberalisation: International Competition Law and the WTO. *World Competition*, Vol. 43, No. 3. <https://doi.org/10.54648/359610>.
- Mubyarto. 2004. Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 19, No. 1.
- Nishioka, K. 2019. International Scope of the Japanese Anti-Monopoly Act in Cross-Border Cartel Cases: A Japanese Approach to ‘Extraterritorial Application’. *Journal of Antitrust Enforcement*, Vol. 8, Issue. 3. doi:10.1093/jaenfo/jnz033.
- Okatvia, F. R. 2023. Indonesia E-Commerce and the Impact on The Economic Growth. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, Vol. 9, Issue. 1. 16.0415/IJARIIE-19245.



- Ong, B., & Toh, D. J. 2023. Digital Dominance and Social Media Platforms: Are Competition Authorities Up to the Task?. *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 54. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01302-1>.
- Pan, W., Xie, T., Wang, Z., & Ma, L. 2022. Digital Economy: An Innovation Driver for Total Factor Productivity. *Journal of Business Research*, Vol. 139. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.061>.
- Payer, A. 2023. "The Territorial Principle as a Basis for State Criminal Jurisdiction: Particularly with Regard to Cross- Border Offences and Attempts, and to Multiple Parties to an Offence Acting in Different Countries". 23 *International Criminal Law Review* 175. <https://ssrn.com/abstract=4404060>.
- Prasetyo, T. 2014. Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3.
- Prasetyo, T. 2016. Kejahatan Pertambangan dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *Perspektif*, Volume XXI, No. 1.
- Prasetyo, Y. 2023. Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2.
- Prete, L. 2018. On Implementation and Effects: The Recent Case-law on the Territorial (or Extraterritorial?) Application of EU Competition Rules. *Journal of European Competition Law & Practice* 9, No. 8. <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpy049>.
- Rutuu, S., Casey, T., & Kotovirta, V. 2017. Development and Competition of Digital Service Platforms: A Sistem Dynamics Approach. *Technological Forecasting & Social Change*, 117. <http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.12.011>.
- Ryngaert, C. 2023. Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in Cyberspace: Normative Shifts. *German Law Journal* 24. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.24>.
- Rysman, M. 2009. The Economics of Two-Sided Markets. *Journal of Economics Perspective*, Vol. 23, No. 3. DOI: 10.1257/jep.23.3.125.
- Samekto, F. A. 2018. Politik Hukum, Paradigma, dan Klaim Kegagalan Pendidikan. *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 007.
- Sarker, I. H. 2022. AI-Based Modeling: Techniques, Applications and Research Issues Towards Automation, Intelligent and Smart Systems. *SN Computer Science*, Vol. 3, No. 158. <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01043-x>.

- Schrepel, T. 2019. Collusion by Blockchain and Smart Contracts. *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 33, No. 1. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3315182>.
- Sertsios, G. 2020. Corporate Finance, Industrial Organization, and Organizational Economics. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 64. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101680>.
- Silalahi, U. 2018. Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 9 No.1.
- Srivastava, A., & Tiwary, A. R. 2021. Competition Law in Asia: The Interplay of Power Dynamics in the Digital Market. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 8, Issue. 2. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i2.23849>.
- Sukarmi, Qaqaya H., Susanto, F. A., & Kurniaty, R. 2021. The Qualified Effects Doctrine in the Extraterritorial of Competition Law Application: An Indonesia Perspective. *Sriwijaya Law Review*, Vol. 5, Issue. 2. <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1050.pp192-204>.
- Suhandi, F. I. 2019. Kebijakan Pre-Merger Notification Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35395>.
- Suryokusumo, S. 2005. Yurisdiksi Negara vs Yurisdiksi Ekstrateritorial. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 2, No. 4. <https://media.neliti.com/media/publikations/39168-EN-yurisdiksi-negara-vs-yurisdiksi-ekstrateritorial.pdf>.
- Tan, G., & Zhou, J. 2021. The Effects of Competition and Entry in Multi-Sided Markets. *The Review of Economic Studies*, Vol. 88, Issue. 2. <https://doi.org/10.1093/restud/rdaa036>.
- Tapsell, R. 2014. Platform Convergence in Indonesia: Challenges and Opportunities for Media Freedom. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, Vol. 21, No. 2. DOI: 10.1177/1354856514531527.
- Toha, K. 2015. Extraterritorial Applicability of Indonesia Business Competition Law as an Efforts Dealing ASEAN Single Market. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 1. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.1.359>.
- Toha, K. 2019. Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha di Indonesia: Problem dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=jhp>.

- Uzunidis, D. 2016. Propaedeutics in the Theory of the Industrial Organisation: the SCP (Structure, Conduct, Performance) Model. *Journal of Innovation Economics & Management* 2. <https://doi.org/10.3917/jie.020.0197>.
- Wahjono, P. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan. *Forum Keadilan*, No. 29.
- Wasti, R. M. 2015. Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1.
- Wicaksono, M. R., Dkk. 2019. Implementing The Extraterritoriality Principle to Strengthen Competition Law Enforcement in Indonesia in the AEC Era: A Comparative Studi. *Indonesia Law Review*, Vol. 9, No. 1. <http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v1n9.498>.
- Wiganarto, T. U., Gultom, E., & Sudaryat. 2022. Use of Indirect Evidence in Disclosure of Cartel Violations According to Business Competition Law in Indonesia". *Protection: Journal of Land and Environmental Law*, Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i1.340>.
- Yusuf, M. F. 2022. Reformulasi Sistem Post Merger Notification untuk Menghindari Rechtvacuum Pembatalan Merger oleh KPPU. *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2, No. 2.
- Zelger, B. 2020. EU Competition Law and Extraterritorial Jurisdiction – A Critical Analysis of the ECJ's Judgement in Intel. *European Competiton Journal*, Vol. 16, No. 2-3. <https://doi.org/10.1080/17441056.2020.1840844>.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004.

Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007.

Putusan KPPU Perkara Nomor: 14/KPPU-I/2014.

Putusan KPPU Perkara Nomor: 17/KPPU-M/2015.

Putusan KPPU Perkara Nomor: 08/KPPU-I/2020.

**Lain-Lain:**

ASEAN,. 2010. *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*. Jakarta: The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division.

Bari, M. A. 2020. *Analisis Indikasi Predatory Pricing E-Commerce dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Cavallo, A. 2018. " More Amazon Effects: Online Competition and Pricing Behaviors". *NBER Working Paper No. 25138*. <https://www.nber.org/papers/w25138>.

Bundeskartellamt. 2014. *Guidance on Domestic Effects in Merger Control*. Jerman: Bundeskartellamt.

Bundeskartellamt. 2019. *Algorithms and Competition*. Bonn: Bundeskartellamt. <https://www.autoritedelaconurrence.fr/sites/default/files/algorithms-and-competition.pdf>.

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2020. *Ringkasan Eksekutif: Penelitian Pelaku Usaha dan Struktur Pasar pada Sektor Ekonomi Digital*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Lutfi, M. F. 2022. *Advokasi Kebijakan Hukum Terhadap E-Commerce Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Jakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pratama, K. J. 2022. *Penguatan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait Mekanisme Pengawasan Perilaku Jual Rugi yang Dilakukan oleh Foreign Electronic Commerce*. Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- PwC. 2023. *Global Top 100 companies - by market capitalisation*. <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publikations/top100/pwc-global-top-100-companies-2023.pdf>. Diakses pada 27 Oktober 2023.
- Shidarta. 2018. "Sekilas Aliran-Aliran dalam Persaingan Usaha". <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/11/sekilas-aliran-aliran-dalam-persaingan-usaha/>. Diakses pada 27 Oktober 2023.
- <https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Competition-Action-Plan-ACAP-2016-2025.pdf>.
- <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/tiktok-shop-masih-masa-transisi-kemendag-minta-masyarakat-ikut-awasi>.